PERAN LIMBAGO ADAT NAGORI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU

NETA RISMAILANY

NPP. 33. 0182

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: neta59634@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Maichel Wutoy, MM.

Email: wutoymichael@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (Gap): *The existence of customary institutions in regional governance has increasingly gained formal legitimacy through local government regulations. However, previous studies on customary institutions generally focus on socio-cultural functions and conflict resolution at the village level. Research discussing customary institutions that have obtained formal legitimacy and possess structural closeness to local governments remains limited. Limbago Adat Nagori (LAN) in Kuantan Singingi Regency received formal legitimacy through Regent Regulation Number 25 of 2023 as a partner of the regional government in preserving customs and social life within the community.* ***Objective:*** *This study aims to analyze the role of Limbago Adat Nagori (LAN) in regional governance in Kuantan Singingi Regency, Riau Province.* ***Method:*** *This study employed a qualitative research method with a descriptive approach based on the Hybrid Institutions theory. The research informants consisted of LAN administrators, local government officials, customary leaders, and community members selected purposively. Data collection techniques included interviews, Focus Group Discussion (FGD), documentation, and literature studies. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.* ***Results/Findings:*** *The findings indicate that LAN plays a role in preserving customary values, resolving social conflicts, strengthening community participation, and serving as a partner of the regional government in supporting cultural preservation and policy legitimacy. However, the implementation of these roles still faces challenges, including limited institutional capacity, suboptimal coordination, and potential political intervention.* ***Conclusion:*** *This study concludes that LAN has a strategic role in regional governance. However, strengthening institutional capacity and improving coordination are still necessary to optimize its role.*

Keywords: customary institution, formal legitimacy, Limbago Adat Nagori, local governance, regional governance.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Keberadaan lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin memperoleh legitimasi formal melalui regulasi pemerintah daerah. Namun, penelitian mengenai lembaga adat umumnya masih berfokus pada fungsi sosial budaya dan penyelesaian konflik adat di tingkat desa. Penelitian mengenai lembaga adat yang telah memperoleh legitimasi formal serta memiliki kedekatan struktural dengan pemerintah daerah masih relatif terbatas. *Limbago Adat Nagori* (LAN) di Kabupaten Kuantan Singingi telah memperoleh legitimasi formal melalui Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2023 sebagai mitra pemerintah daerah dalam pelestarian adat dan kehidupan sosial masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *Limbago Adat Nagori* (LAN) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif berdasarkan teori *Hybrid Institutions*. Informan penelitian terdiri dari pengurus LAN, pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat yang dipilih secara purposive. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD), dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAN memiliki peran dalam menjaga nilai adat, menyelesaikan konflik sosial, memperkuat partisipasi masyarakat, serta menjadi mitra pemerintah daerah dalam mendukung pelestarian adat dan legitimasi kebijakan pemerintah. Namun, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan kapasitas kelembagaan, koordinasi yang belum optimal, dan potensi intervensi politik. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa LAN memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun masih diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi agar perannya berjalan optimal.

Kata Kunci*:* legitimasi formal, lembaga adat, *Limbago Adat Nagori*, pemerintahan daerah, tata kelola lokal.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan lembaga adat di Indonesia memiliki posisi penting dalam menjaga identitas budaya, stabilitas sosial, serta hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat, hak-hak tradisional, dan identitas budaya masyarakat adat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa lembaga adat tidak hanya dipandang sebagai warisan budaya, tetapi juga memiliki peran dalam kehidupan sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan Fahlevvi et al. (2024) yang menjelaskan bahwa penguatan budaya lokal penting untuk menjaga identitas masyarakat dan keberlanjutan nilai-nilai adat. Patarai, Ibrahim, dan Tasbih (2021) juga menegaskan bahwa budaya lokal memiliki keterkaitan erat dengan dinamika pemerintahan daerah melalui perannya dalam menjaga integrasi sosial masyarakat.

Penguatan peran lembaga adat dalam pemerintahan daerah semakin terlihat melalui regulasi yang memberikan legitimasi formal kepada lembaga adat. Sutiyo et al. (2024) menjelaskan bahwa relasi antara adat dan pemerintah daerah merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena dapat memperkuat harmonisasi sosial dan legitimasi pemerintahan lokal, meskipun hubungan keduanya sering kali belum berjalan secara integratif.

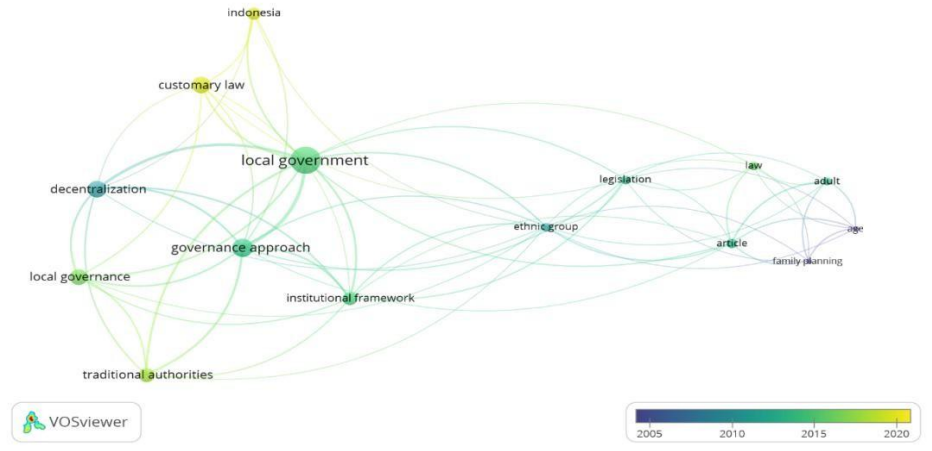
Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang masih mempertahankan pengaruh kuat nilai-nilai adat dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut tercermin dari masih aktifnya struktur adat, pelaksanaan tradisi budaya, serta peran tokoh adat dalam kehidupan sosial masyarakat. Sebagai bentuk pengakuan formal terhadap lembaga adat, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi membentuk Limbago Adat Nagori (LAN) melalui Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2023. LAN diposisikan sebagai mitra pemerintah daerah dalam pelestarian adat, penyelesaian persoalan sosial, dan penguatan kehidupan sosial budaya masyarakat. Namun, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas kelembagaan, koordinasi yang belum optimal, serta potensi intervensi politik akibat kedekatan struktural dengan pemerintah daerah. Di sisi lain, penelitian mengenai lembaga adat yang telah memperoleh legitimasi formal dan memiliki hubungan struktural dengan pemerintah daerah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran Limbago Adat Nagori (LAN) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi menjadi penting untuk dilakukan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Perkembangan penelitian mengenai lembaga adat menunjukkan bahwa lembaga adat masih dipandang sebagai bagian penting dalam menjaga nilai budaya, memperkuat kohesi sosial, menyelesaikan konflik, serta mendukung tata kelola pemerintahan lokal. Namun, sebagian besar penelitian masih menempatkan lembaga adat sebagai institusi sosial budaya yang beroperasi pada tingkat komunitas atau pemerintahan desa. Pedersen (2021) menjelaskan bahwa lembaga adat berperan dalam praktik governance lokal melalui keterlibatan masyarakat dalam institusi adat, tetapi belum membahas hubungan kelembagaan adat dengan pemerintah daerah yang memperoleh legitimasi formal dari negara. Ramenzoni (2021) menunjukkan bahwa praktik *co-governance* yang melibatkan institusi adat sering menghadapi kendala dalam integrasi antara kebijakan pemerintah dan sistem adat lokal, namun lebih berfokus pada tata kelola sumber daya. Sementara itu, Wasistiono dan Rohmadin (2020) menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi belum secara khusus mengkaji lembaga adat yang memperoleh pengakuan formal melalui regulasi pemerintah daerah.

Untuk memperkuat identifikasi kesenjangan penelitian, penulis melakukan analisis bibliometrik menggunakan perangkat lunak VOSviewer terhadap publikasi ilmiah mengenai *customary institutions*, *local governance*, dan *hybrid governance* periode 2021–2025. Hasil analisis menunjukkan bahwa penelitian mengenai lembaga adat masih terkonsentrasi pada tema pelestarian budaya, masyarakat hukum adat, partisipasi masyarakat, dan penyelesaian konflik

sosial. Sebaliknya, kajian mengenai legitimasi formal lembaga adat, hubungan kelembagaan dengan pemerintah daerah, serta perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih relatif terbatas.



Sumber: diolah penulis (Scopus–VOSviewer, 2025)

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat tiga kesenjangan penelitian. Pertama, penelitian terdahulu masih berfokus pada fungsi sosial budaya lembaga adat dan belum banyak mengkaji lembaga adat yang memperoleh legitimasi formal melalui regulasi pemerintah daerah. Kedua, penelitian mengenai hubungan antara lembaga adat dan pemerintah daerah umumnya masih menempatkan lembaga adat sebagai aktor pendukung sehingga belum menjelaskan peran strategisnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ketiga, penggunaan perspektif *Hybrid Institutions* untuk menjelaskan interaksi antara nilai adat dan sistem pemerintahan formal pada lembaga adat di Indonesia masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji peran Limbago Adat Nagori (LAN) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menempatkan LAN sebagai lembaga adat yang memperoleh legitimasi formal melalui Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2023 dan memiliki kedekatan struktural dengan pemerintah daerah. Melalui perspektif *Hybrid Institutions*, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana LAN mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan sistem pemerintahan formal dalam tata kelola pemerintahan daerah.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena Limbago Adat Nagori memiliki peran dalam menjaga harmonisasi sosial, menyelesaikan konflik, dan memperkuat hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Di tengah perkembangan pemerintahan daerah modern, keberadaan lembaga adat menjadi penting sebagai mitra pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis nilai budaya lokal. Selain itu, kajian mengenai lembaga

adat sebagai *hybrid institutions* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masih relatif terbatas, khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian mengenai lembaga adat dan institusi hibrida, sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kolaborasi kelembagaan dengan Limbago Adat Nagori.

1.4. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai lembaga adat telah banyak dilakukan dengan berbagai fokus dan pendekatan. Secara umum, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa lembaga adat berperan dalam menjaga nilai budaya, memperkuat partisipasi masyarakat, menyelesaikan konflik sosial, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan lokal. Namun, kajian yang ada masih menunjukkan sejumlah keterbatasan yang membuka ruang bagi penelitian lebih lanjut.

Beberapa penelitian menyoroti peran lembaga adat dalam pemerintahan dan pembangunan desa. Khairi dkk. (2025) menjelaskan bahwa nilai dan hukum adat masih terintegrasi dalam praktik pemerintahan desa di Indonesia. Haji (2022) menemukan bahwa lembaga adat memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa, sedangkan Samsudin dkk. (2021) menunjukkan peran lembaga adat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa melalui penguatan partisipasi masyarakat. Selain itu, Badjuka dkk. (2024) menjelaskan bahwa penguatan lembaga adat melalui pendekatan collaborative governance dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat adat. Hasanah dkk. (2025) juga menunjukkan bahwa lembaga adat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat, legitimasi pemerintahan lokal, dan penyelesaian konflik sosial.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa lembaga adat masih relevan dalam mendukung tata kelola pemerintahan lokal. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada pemerintahan desa, pembangunan masyarakat, dan pelestarian budaya. Penelitian yang membahas hubungan antara lembaga adat dan pemerintah juga cenderung menempatkan lembaga adat sebagai aktor pendukung, sehingga belum menjelaskan secara mendalam posisi lembaga adat yang telah memperoleh legitimasi formal melalui regulasi pemerintah daerah. Selain itu, kajian mengenai lembaga adat yang memiliki kedekatan struktural dengan pemerintah daerah serta beroperasi pada pertemuan antara sistem adat dan sistem pemerintahan formal masih relatif terbatas.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, masih diperlukan penelitian yang menjelaskan bagaimana lembaga adat menjalankan perannya setelah memperoleh legitimasi formal dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji peran Limbago Adat Nagori (LAN) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini menempatkan LAN sebagai lembaga adat yang memperoleh legitimasi formal melalui Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2023 dan memiliki hubungan kelembagaan yang dekat dengan pemerintah daerah. Penelitian ini juga menggunakan perspektif Hybrid Institutions untuk menganalisis interaksi antara nilai-nilai adat dan sistem pemerintahan formal dalam pelaksanaan peran LAN. Dengan demikian,

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian mengenai lembaga adat, tata kelola pemerintahan daerah, dan institusi hibrida di Indonesia.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada objek kajian, perspektif teoritis, dan fokus analisis yang digunakan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya mengkaji lembaga adat dalam konteks pelestarian budaya, penyelesaian konflik sosial, pembangunan desa, dan partisipasi masyarakat, penelitian ini menempatkan Limbago Adat Nagori (LAN) sebagai lembaga adat yang telah memperoleh legitimasi formal melalui Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2023 serta memiliki kedekatan struktural dengan pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan teori Hybrid Institutions yang dikemukakan oleh Skelcher dan Smith (2015) untuk menganalisis interaksi antara nilai-nilai adat dan sistem pemerintahan formal dalam satu institusi. Analisis dilakukan melalui empat dimensi utama, yaitu dual legitimacy, dual institutional logics, institutional function change, dan institutional identity change. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menjelaskan transformasi LAN sebagai lembaga adat yang beroperasi pada pertemuan antara sistem adat dan sistem pemerintahan formal.

Kebaruan lainnya terletak pada temuan yang menunjukkan bahwa LAN tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pelestari adat, tetapi juga berkembang sebagai institusi hibrida yang mengintegrasikan legitimasi sosial masyarakat adat dengan legitimasi formal pemerintah daerah. Temuan tersebut diharapkan dapat memperkaya pengembangan teori Hybrid Institutions dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia serta memberikan kontribusi empiris mengenai peran lembaga adat dalam tata kelola pemerintahan daerah.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Limbago Adat Nagori (LAN) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis peran Limbago Adat Nagori (LAN) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial secara mendalam serta memahami dinamika hubungan antara lembaga adat dan pemerintah daerah dalam konteks yang alami dan kompleks (Sugiyono, 2023). Penelitian ini menggunakan perspektif *Hybrid Institutions* yang dikemukakan oleh Skelcher dan Smith (2015) untuk menganalisis interaksi antara nilai-nilai adat dan sistem pemerintahan formal dalam pelaksanaan peran LAN.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, *Focus Group Discussion* (FGD), dokumentasi, dan studi kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan secara

purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan, pengalaman, dan pengetahuan informan terhadap pelaksanaan peran LAN. Informan penelitian terdiri atas pengurus Limbago Adat Nagori, unsur Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, tokoh adat, dan masyarakat yang memahami keberadaan serta aktivitas LAN. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Ketua Umum Limbago Adat Nagori beserta pengurus inti LAN karena memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai kebijakan, program, serta pelaksanaan peran LAN dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Simangunsong (2017) menjelaskan bahwa informan kunci merupakan informan yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam pada topik tertentu yang menjadi keahliannya. Selain itu, pemilihan informan kunci juga didasarkan pada posisi strategis mereka dalam memahami hubungan antara LAN dan pemerintah daerah.

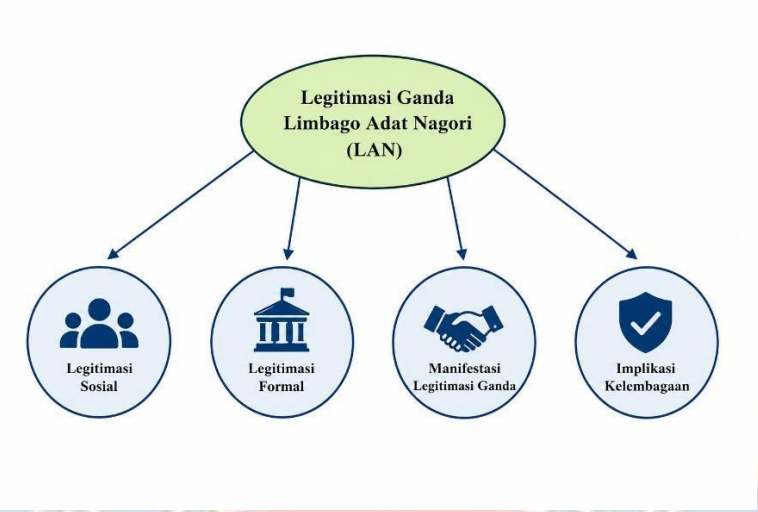
Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, dokumentasi, serta hasil FGD dari berbagai informan. Teknik triangulasi digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas data penelitian melalui perbandingan berbagai sumber informasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi, tabel, dan gambar, serta penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dengan fokus penelitian pada Limbago Adat Nagori (LAN). Pengumpulan data lapangan dilakukan selama kurang lebih dua bulan, yaitu pada bulan April sampai dengan Mei 2025.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran Limbago Adat Nagori (LAN) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi menggunakan teori *Hybrid Institutions* dari Skelcher dan Smith (2015). Teori ini menjelaskan bahwa lembaga hibrida memiliki karakteristik berupa legitimasi ganda (*dual legitimacy*), interaksi logika adat dan logika negara (*dual institutional logics*), perubahan fungsi kelembagaan, dan perubahan identitas kelembagaan. Adapun pembahasan hasil penelitian dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Legitimasi Ganda *(Dual Legitimacy)*

Legitimasi ganda (*dual legitimacy*) merupakan kondisi ketika suatu institusi memperoleh pengakuan dari dua sumber legitimasi yang berbeda, yaitu masyarakat dan negara. Dalam perspektif *Hybrid Institutions*, kondisi ini memungkinkan suatu lembaga menjalankan fungsi tradisional sekaligus berpartisipasi dalam tata kelola pemerintahan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Limbago Adat Nagori (LAN) memiliki karakteristik tersebut sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:



Sumber: Diolah peneliti, 2026.

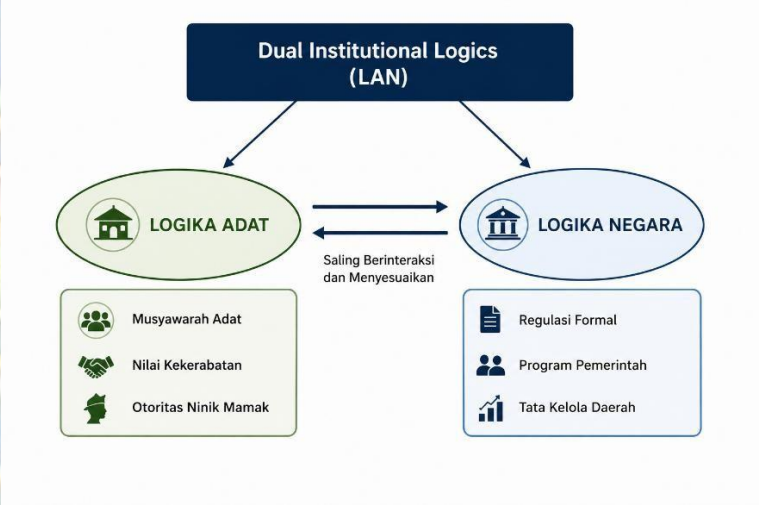
Berdasarkan tersebut legitimasi sosial LAN bersumber dari kepercayaan masyarakat adat yang telah terbentuk jauh sebelum LAN memperoleh pengakuan formal. Struktur adat seperti penghulu, monti, dan niniak mamak masih dipandang memiliki otoritas moral dalam menjaga nilai adat serta menyelesaikan berbagai persoalan sosial melalui musyawarah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat masih menjadikan tokoh adat sebagai rujukan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat maupun konflik sosial lainnya. Selain itu, LAN juga memperoleh legitimasi formal melalui Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Masyarakat Adat. Regulasi tersebut memberikan pengakuan hukum terhadap keberadaan LAN sekaligus membuka ruang keterlibatannya dalam berbagai kegiatan pemerintahan daerah. Hasil wawancara dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan bahwa LAN dipandang sebagai bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelestarian nilai-nilai adat.

Kombinasi legitimasi sosial dan legitimasi formal tersebut membentuk legitimasi ganda yang memperkuat posisi LAN sebagai penghubung antara masyarakat adat dan pemerintah daerah. Kondisi ini terlihat dari semakin terbukanya pelibatan LAN dalam berbagai forum pemerintahan, meskipun beberapa informan menilai keterlibatan tersebut masih belum sepenuhnya optimal. Temuan penelitian ini sejalan dengan Abbott dan Faude (2022) yang menjelaskan bahwa institusi hibrida memperoleh kapasitas dan pengaruh melalui kombinasi legitimasi formal dan informal yang saling melengkapi. Temuan ini juga memperkuat penelitian Rosser, Ilgenstein, dan Sager (2022) yang menunjukkan bahwa keberlangsungan organisasi hibrida ditentukan oleh kemampuannya mempertahankan legitimasi dari masyarakat sekaligus memperoleh pengakuan institusional negara. Selain itu, Justina dan Verkoren (2021) menjelaskan bahwa interaksi antara otoritas tradisional dan pemerintah dapat menghasilkan tata kelola hibrida yang memperkuat peran lembaga lokal dalam pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa LAN merupakan institusi hibrida yang memperoleh

legitimasi dari masyarakat adat dan pemerintah daerah secara bersamaan. Legitimasi sosial menjaga otoritas moral LAN di tengah masyarakat, sedangkan legitimasi formal memperkuat kedudukan kelembagaannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, legitimasi ganda menjadi fondasi utama yang memungkinkan LAN menjalankan fungsi penghubung antara sistem adat dan sistem pemerintahan modern di Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2. *Dual Instutional Logics*

Konsep *dual institutional logics* menjelaskan kondisi ketika suatu lembaga harus beroperasi dengan mengakomodasi lebih dari satu sistem nilai, norma, dan aturan secara bersamaan. Dalam perspektif *Hybrid Institutions*, kondisi tersebut terjadi ketika logika tradisional dan logika formal negara bertemu dalam satu organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Limbago Adat Nagori (LAN) menjalankan kedua logika tersebut secara simultan dalam pelaksanaan perannya di Kabupaten Kuantan Singingi.



Sumber: Diolah Peneliti, 2026.

Berdasarkan diatas logika adat dalam LAN tercermin melalui pelaksanaan fungsi-fungsi yang berorientasi pada nilai budaya, musyawarah, serta hubungan kekerabatan yang telah lama menjadi dasar kehidupan masyarakat Kuantan Singingi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa adat, konflik sosial, maupun persoalan masyarakat masih mengedepankan musyawarah yang dipimpin oleh para ninik mamak dengan mempertimbangkan norma dan nilai adat yang berlaku. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam LAN tidak hanya didasarkan pada aturan formal, tetapi juga pada nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Di sisi lain, LAN juga menjalankan logika negara melalui keterlibatannya dalam berbagai kegiatan pemerintahan daerah. Setelah memperoleh pengakuan melalui Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2023, LAN mulai terlibat dalam berbagai forum pemerintahan, kegiatan pembangunan daerah, serta program pelestarian adat

yang difasilitasi pemerintah daerah. Keterlibatan tersebut mengharuskan LAN menyesuaikan diri dengan mekanisme administrasi, regulasi, dan tata kelola pemerintahan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua logika tersebut tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dalam pelaksanaan fungsi LAN. Ketika menghadapi persoalan masyarakat, LAN tetap menggunakan pendekatan musyawarah adat, namun pada saat yang sama mempertimbangkan ketentuan hukum dan kebijakan pemerintah daerah. Sebaliknya, dalam berbagai program pemerintah, LAN berperan menerjemahkan kebijakan formal ke dalam konteks sosial budaya masyarakat sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat adat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ponte dan Pesci (2022) yang menjelaskan bahwa perubahan dan keberlangsungan organisasi hibrida dipengaruhi oleh interaksi berbagai logika kelembagaan yang hidup dalam organisasi tersebut. Temuan ini juga memperkuat penelitian Justina dan Verkoren (2021) yang menunjukkan bahwa tata kelola hibrida terbentuk melalui proses negosiasi antara otoritas tradisional dan institusi negara dalam ruang pemerintahan yang sama. Sejalan dengan itu, Pitono et al. (2023) menjelaskan bahwa institusi informal dapat berkolaborasi dengan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan penyelesaian persoalan sosial masyarakat. Dalam konteks LAN, interaksi kedua logika tersebut memungkinkan lembaga adat tetap mempertahankan identitas budayanya sekaligus beradaptasi dengan tuntutan pemerintahan modern. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa LAN tidak hanya menjalankan logika adat maupun logika negara secara terpisah, tetapi mengintegrasikan keduanya dalam praktik kelembagaan sehari-hari. Interaksi tersebut menjadikan LAN berfungsi sebagai institusi hibrida yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat adat dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.3. Perubahan Fungsi Kelembagaan Limbago Adat Nagori

Perubahan fungsi kelembagaan LAN terlihat setelah adanya pengakuan formal melalui Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Masyarakat Adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAN tidak hanya menjalankan fungsi pelestarian adat dan penyelesaian persoalan sosial masyarakat, tetapi juga mulai terlibat dalam berbagai kegiatan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan masyarakat adat dan pembangunan sosial kemasyarakatan.

Keterlibatan tersebut menunjukkan adanya perluasan fungsi kelembagaan. LAN yang sebelumnya berfokus pada pembinaan pemangku adat dan pelestarian nilai-nilai adat kini turut berperan sebagai mitra pemerintah daerah dalam berbagai agenda yang berkaitan dengan adat, budaya, dan masyarakat. Fungsi adat yang menjadi identitas utama LAN tetap dipertahankan, sementara fungsi baru berkembang sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan kelembagaan yang berubah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Liu dan Zhang (2022) yang menjelaskan bahwa organisasi hibrida cenderung menyesuaikan fungsi kelembagaannya untuk merespons tuntutan kelembagaan yang semakin kompleks. Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian Wahyudi (2024) yang menunjukkan bahwa lembaga adat dapat mengalami perluasan peran hingga berkontribusi dalam ruang pemerintahan dan politik lokal. Perubahan fungsi tersebut menunjukkan bahwa LAN tidak mengalami pergeseran dari lembaga adat menjadi lembaga pemerintah, melainkan berkembang sebagai institusi hibrida yang mampu menjalankan fungsi adat sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.4. Perubahan Identitas Kelembagaan LAN

Perubahan identitas kelembagaan LAN terlihat dari posisi lembaga yang tidak lagi dipandang hanya sebagai wadah pemangku adat, tetapi juga sebagai mitra pemerintah daerah dalam berbagai urusan yang berkaitan dengan masyarakat adat. Pengakuan melalui Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2023 memperkuat kedudukan LAN dalam tata kelola daerah tanpa menghilangkan identitas adat yang telah melekat sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas adat tetap menjadi fondasi utama LAN melalui pelestarian nilai, norma, dan struktur adat yang hidup dalam masyarakat Kuantan Singingi. Namun, hubungan yang semakin erat dengan pemerintah daerah membentuk identitas baru yang menempatkan LAN sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat adat dan pemerintah daerah.

Temuan ini sejalan dengan Zollo et al. (2023) yang menjelaskan bahwa organisasi hibrida mampu menggabungkan berbagai identitas kelembagaan dalam satu organisasi. Temuan ini juga diperkuat oleh Fu dan Cooper (2025) yang menunjukkan bahwa organisasi dapat mempertahankan identitas utamanya sambil mengembangkan identitas baru sebagai respons terhadap perubahan lingkungan kelembagaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa LAN berkembang sebagai institusi hibrida yang mengintegrasikan identitas adat dan identitas formal secara bersamaan.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini berfokus pada aspek legitimasi ganda (*dual legitimacy*) yang menunjukkan bahwa Limbago Adat Nagori (LAN) memperoleh legitimasi dari dua sumber sekaligus, yaitu masyarakat adat dan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi sosial LAN masih kuat karena masyarakat tetap menempatkan pemangku adat sebagai pihak yang memiliki otoritas moral dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial melalui mekanisme musyawarah adat. Pengakuan formal melalui Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2023 semakin memperkuat posisi LAN dalam tata kelola daerah. Temuan ini sama halnya dengan penelitian Abbott dan Faude (2022) yang menjelaskan bahwa institusi

hibrida memperoleh kekuatan kelembagaan melalui kombinasi legitimasi formal dan informal yang saling melengkapi.

Temuan utama berikutnya berkaitan dengan interaksi logika adat dan logika negara (*dual institutional logics*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAN tetap menjalankan nilai-nilai adat dalam pelaksanaan fungsi kelembagaannya, namun pada saat yang sama juga menyesuaikan diri dengan mekanisme pemerintahan daerah. Musyawarah adat tetap menjadi dasar penyelesaian persoalan masyarakat, sementara pengakuan pemerintah daerah membuka ruang keterlibatan LAN dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Temuan ini memperkuat penelitian Justina dan Verkoren (2021) yang menjelaskan bahwa tata kelola hibrida terbentuk melalui interaksi antara otoritas tradisional dan institusi negara dalam ruang pemerintahan yang sama.

Temuan selanjutnya berkenaan dengan perubahan fungsi kelembagaan LAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi LAN tidak lagi terbatas pada pelestarian adat dan pembinaan pemangku adat, tetapi juga berkembang sebagai mitra pemerintah daerah dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat adat dan pembangunan sosial kemasyarakatan. Perubahan tersebut tidak menghilangkan fungsi adat yang telah dijalankan sebelumnya, melainkan memperluas peran kelembagaan LAN. Temuan ini sejalan dengan penelitian Liu dan Zhang (2022) yang menunjukkan bahwa organisasi hibrida cenderung melakukan penyesuaian fungsi sebagai respons terhadap perubahan lingkungan kelembagaan.

Temuan terakhir yang dianggap penting dalam penelitian ini berkaitan dengan perubahan identitas kelembagaan LAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAN tidak lagi dipandang hanya sebagai wadah pemangku adat, tetapi juga sebagai mitra pemerintah daerah dalam tata kelola masyarakat adat. Identitas adat tetap menjadi fondasi utama kelembagaan, sementara identitas formal berkembang melalui hubungan yang semakin erat dengan pemerintah daerah. Temuan ini sama halnya dengan penelitian Zollo et al. (2023) yang menjelaskan bahwa organisasi hibrida mampu mengintegrasikan berbagai identitas kelembagaan tanpa kehilangan identitas utamanya.

Keseluruhan temuan tersebut menunjukkan bahwa proses hibridisasi kelembagaan pada LAN berlangsung melalui penggabungan unsur adat dan unsur pemerintahan dalam satu struktur kelembagaan. Kondisi ini menghasilkan bentuk kelembagaan yang tidak sepenuhnya tradisional maupun birokratis, melainkan institusi hibrida yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat adat dan pemerintah daerah di Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Penelitian

Temuan menarik lain dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan peran Limbago Adat Nagori (LAN) sebagai institusi hibrida didukung oleh kuatnya kepercayaan masyarakat adat serta adanya pengakuan formal dari pemerintah daerah melalui Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 25 Tahun 2023. Kombinasi kedua faktor tersebut memungkinkan LAN

tetap menjalankan fungsi adat sekaligus memperoleh ruang dalam tata kelola pemerintahan daerah. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa keterlibatan LAN dalam proses pemerintahan masih belum sepenuhnya optimal dan cenderung bersifat situasional pada beberapa kegiatan tertentu. Perubahan sosial dan modernisasi juga menjadi tantangan tersendiri bagi keberlanjutan peran lembaga adat, terutama dalam menjaga keterikatan generasi muda terhadap nilai-nilai adat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberlanjutan peran LAN sebagai penghubung antara sistem adat dan sistem pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Limbago Adat Nagori (LAN) di Kabupaten Kuantan Singingi telah berkembang sebagai *hybrid institution* yang mengintegrasikan unsur adat dan unsur pemerintahan. Karakteristik tersebut terlihat melalui legitimasi ganda, interaksi logika adat dan logika negara, serta perubahan fungsi dan identitas kelembagaan yang memungkinkan LAN tetap mempertahankan nilai-nilai adat sekaligus berperan dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini masih terbatas pada informan dari unsur LAN dan pemerintah daerah serta dilakukan dalam waktu penelitian yang relatif singkat sehingga belum dapat menggambarkan perkembangan kelembagaan LAN secara lebih mendalam.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas peran LAN dalam tata kelola pemerintahan daerah serta melibatkan perspektif masyarakat adat secara lebih luas untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan institusi hibrida di Indonesia.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Penulis menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua atas doa, kasih sayang, dan dukungan yang senantiasa diberikan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pimpinan IPDN, seluruh dosen, serta Bapak Maichel Wutoy yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penelitian. Penghargaan yang sama penulis berikan kepada sahabat dan semua pihak yang telah memberikan dukungan serta kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abbott, K. W., & Faude, B. (2022). Hybrid institutional complexes in global governance. *The Review of International Organizations, 17*(2), 263–287. https://doi.org/10.1007/s11558-021-09431-3

Badjuka, A., Yusuf, M., & Rahman, F. (2024). Collaborative governance in strengthening customary institutions within local government administration. *Journal of Public Administration and Policy, 7*(2), 145–158. https://doi.org/10.54783/japp.v7i2.1139

Fahlevvi, M. R., Titis Sari, P., Ikra Novar, R., Rozali, I., & Wenty, Z. (2024). Pengembangan pembelajaran dengan menekankan budaya lokal Minangkabau pada praja IPDN di Nagari Lasi. *RENATA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua, 2*(1), 43–47. https://doi.org/10.61124/1.renata.42

Fu, J. S., & Cooper, K. R. (2025). Organizational hybridity of multiple identities: Drivers and implications for social innovation. *Management Communication Quarterly, 39*(3). https://doi.org/10.1177/08933189241303736

Haji, H. (2022). Peran lembaga adat dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa Batu Merah Kota Ambon. *Journal of Government Science Studies, 1*(1), 9–17. https://doi.org/10.30598/jgssvol1issue1page09-17

Hasanah, M., Martayana, I. P. H. M., Sihotang, L., & Siahaan, S. (2025). Customary institutions and village governance in Indonesia: A comparative study. *South East Asia Research, 33*(1), 68–86. https://doi.org/10.1080/0967828X.2025.2483169

Justina, P. H., & Verkoren, W. (2021). Hybrid governance in South Sudan: The negotiated state in practice. *Peacebuilding, 9*(3), 292–308. https://doi.org/10.1080/21647259.2021.1917186

Khairi, H., Yahya, A. S., Alma'arif, A., Kulachai, W., & Annuar, S. N. S. (2025). Traditional in modern: The existence of village governance Indonesia. *Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, 25*(1), 121–135. https://doi.org/10.30631/alrisalah.v25i1.1781

Liu, L., & Zhang, C. (2022). Organizational structure change and hybridity: Enhancing uncertainty as a response to competing and changing institutional logics. *Frontiers in Psychology, 13,* 854319. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.854319

Patarai, I., Ibrahim, S., & Tasbih, I. (2019). Toraja: Implikasi budaya dalam pemekaran daerah. *De La Macca, 6,* 10–27. http://eprints.ipdn.ac.id/6255/1/BUKU%20TORAJA.pdf

Pedersen, L. H. (2021). Citizenship diversified: Bali-Hindu customary institutions and democratization. *Citizenship Studies, 25*(7), 930–947. https://doi.org/10.1080/13621025.2021.1911934

Pitono, A., Harahap, A. S., Kartiwi, K., & Baidhowah, A. R. (2023). Informal institutions, government regulatory functions, and development of governance studies. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, 16*(2), 2–3. https://doi.org/10.33701/jppdp.v16i2.3746

Ponte, D., & Pesci, C. (2022). Institutional logics and organizational change: The role of place and time. *Journal of Management and Governance, 26*(3), 899–924. https://doi.org/10.1007/s10997-021-09578-6

Ramenzoni, V. C. (2021). Co-governance, transregional maritime conventions, and indigenous customary practices among subsistence fishermen in Ende, Indonesia. *Frontiers in Marine Science, 8*, 668586. https://doi.org/10.3389/fmars.2021.668586

Rosser, C., Ilgenstein, S. A., & Sager, F. (2022). The iterative process of legitimacy-building in hybrid organizations. *Administration & Society, 54*(8), 1497–1526. https://doi.org/10.1177/00953997211055102

Samsuddin, Hendrayani, S., & Latief, S. (2021). Peran lembaga adat dalam perencanaan pembangunan Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Tanah Pilih, 1*(1), 3. https://doi.org/10.30631/tpj.v1i1.675

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan* (3rd ed.). Alfabeta.

Skelcher, C., & Smith, S. R. (2015). Theorizing hybridity: Institutional logics, complex organizations, and actor identities: The case of nonprofits. *Public Administration, 93*(2), 433–448. https://doi.org/10.1111/padm.12105

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretif, interaktif, dan konstruktif*. Alfabeta.

Sutiyo, S., Polyando, P., Aser, F., & Ilham, T. (2024). Relasi adat dan pemerintahan di Papua Selatan: Analisis kelembagaan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 50*(1), 91–99. https://doi.org/10.33701/jipwp.v50i1.4064

Wahyudi, J. (2024). Tracking the role of Lembaga Adat Tana Samawa as an informal democratic institution in the local political arena in Sumbawa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 50*(1), 79–90. https://doi.org/10.33701/jipwp.v50i1.4092

Wasistiono, S., & Rohmadin, S. (2020). Penguatan kelembagaan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 46*(1), 213–229. https://doi.org/10.33701/jipwp.v46i1.1110

Zollo, L., Pellegrini, M. M., Faldetta, G., & Rialti, R. (2023). How to combine multiple identities and gaining stakeholders legitimacy in hybrid organizations? An organizational design response. *Journal of Management and Governance*, *27*(4), 1189–1222. https://doi.org/10.1007/s10997-022-09644-7